

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

2.1 Kabupaten Sukoharjo

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Portal Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di provinsi Jawa Tengah dengan koordinat astronomis antara 110° 42' dan 110° 57' Bujur Timur serta 7° 32' dan 7° 49' Lintang Selatan. Dengan luas 46.666 Km², atau 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki empat batas-batas wilayah administrasi. Di sebelah utara terdapat Kota Surakarta dengan

Kabupaten Karanganyar. Di sebelah selatan terdapat Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri. Di sebelah Barat terdapat Kabupaten Karanganyar dan di sebelah timur terdapat Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara toponografi Kabupaten Sukoharjo terdiri dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah terletak di bagian utara dan perbukitan di bagian selatan dan timur. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson, dengan dua musim, yaitu musim kemarau dari april hingga September dan musim hujan dari Oktober hingga Maret. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 1.790 mm, suhu udara berkisar antara 23 C hingga 34 C, dan kelembapan tahunan rata-rata adalah 77%.

Kabupaten Sukoharjo, dalam sistem hidrologinya, terletak di sepanjang Sungai Bengawan Solo, yang dilalui oleh beberapa sungai besar, termasuk Sungai Bengawan Solo dan Sungai Proyek Waduk GM. Sebagai daerah aliran sungai (DAS), secara alami berfungsi sebagai daerah tangkapan air (DTA) untuk pembuangan air dari sungai – sungai yang mengalir melaluinya, yang seringkali menyebabkan banjir pada musim hujan.

Pola pemanfaatan lahan meliputi perumahan, tegalan, kebun campuran, sawah, perusahaan, jasa, industri dan pemanfaatan lainnya, dengan sebaran lahan sawah 45,26% dan non sawah 54,74% yang mana lahan sawah irigasi teknis 70,17%, irigasi semi teknis 8,98%, irigasi biasa 9,17%, dan sawah tadah hujan 11,67%.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data Sekretariat Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada semester pertama tahun 2021 adalah 897.916 jiwa, terdiri dari 449.460 jiwa laki-laki dan 448.456 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada semester pertama tahun 2022 adalah 899.407 jiwa, terdiri dari 450.030 jiwa laki-laki dan 449.377 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada semester pertama tahun 2023 adalah 908.227 jiwa, terdiri dari 454.100 jiwa laki-laki dan 454.127 jiwa perempuan.

Berikut data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Total Jumlah Penduduk
1.	Weru	57.910
2.	Bulu	37.179
3.	Tawang Sari	56.995
4.	Sukoharjo	100.179
5.	Nguter	56.015
6.	Bendosari	65.180
7.	Polokarto	88.708
8.	Mojolaban	93.242
9.	Grogol	121.870
10.	Baki	72.678
11.	Gatak	54.532
12.	Kartasura	111.984
Total		916.472

Sumber: portal.sukoharjokab.go.id

Dari data diatas Kabupaten Sukoharjo memiliki penduduk yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan total penduduk 908.227 jiwa, terdiri atas 454.100 jiwa laki-laki dan 454.127 jiwa perempuan. Kecamatan Grogol merupakan kecamatan dengan penduduk paling banyak. Kemudian Kecamatan Surakarta menempati posisi kedua penduduk terbanyak. Semetara itu, Kecamatan Bulu menjadi kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit, penduduknya hanya berjumlah 37.340 jiwa. Juga Kecamatan Gatak dengan penduduk 53.876 jiwa dan Kecamatan Nguter dengan penduduk 55.641 jiwa. Persebaran penduduk lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seeperti Grogol, Surakarta, Mojolaban dan Sukoharjo. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan umlah penduduk antar kecamatan yang berkaitan dengan tingkat urbanisasi, akses terhadap pusat ekonomi, serta ketersediaan sarana dan prasaranan di masing-masing wilayah.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-laki)	Penduduk (Perempuan)	Total Penduduk
0-4	32.955,0	31.569	64.524
5-9	32.502,0	31.143	63.645
10-14	33.965,0	32.687	66.652
15-19	36.970,0	34.551	71.521
20-24	35.943,0	34.208	70.151
25-29	34.422,0	33.213	67.635
30-34	34.169,0	33.729	67.898
35-39	34.075,0	33.574	67.649
40-44	35.887,0	35.535	71.422
45-49	34.953,0	35.663	70.616

50-54	31.648,0	32.489	64.137
55-59	28.590,0	29.915	58.505
60-64	23.294,0	25.001	48.295
65-69	17.862,0	18.854	36.716
70-74	12.154,0	13.854	26.008
75+	11.128,0	15.148	26.276
Jumlah/Total	470.517,0	471.133	941.659

Sumber: Data BPS Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, melihat dari sisi umur, mayoritas penduduk Kabupaten Sukoharjo berada pada usia produktif (15-64 tahun). Jumlah usia produktif mencapai 640 ribu jiwa sekitar 68% dari total penduduk. Dengan rentang umur terbesar yaitu umur 15-19 tahun dengan 71.521 jiwa. Kemudian juga di umur 40-44 tahun dengan 71.422 jiwa. Hal ini menunjukkan Kabupaten Sukoharjo memiliki bonus demografi yang signifikan dimana mayoritas penduduk berada pada umur produktif yang mana mayoritas penduduk berpotensi berkontribusi besar dalam kegiatan sosial, ekonomi dan dinamika pembangunan daerah serta partisipasi politik.

2.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo memiliki visi “Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat”. Maju berarti pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian penduduk agar mampu bersaing dengan daerah lain. Keadilan berarti semua kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa

diskriminasi, sehingga semua masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat menikmati kesejahteraan secara merata. Lebih lanjut, martabat menekankan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpadu agar masyarakat dapat bangga menjadi bagian dari Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Sukoharjo memiliki misi untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan adaptif dan amanah (governance) serta layanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkepribadian, produktif dan responsif gender.
3. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat yang inklusif.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

2.2 Latar Belakang Politik Etik Suryani dalam Konteks Politik Lokal Sukoharjo

2.2.1 Latar Belakang Etik Suryani dan Aktivitas Politiknnya

Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. lahir di Surakarta pada 15 Maret 1963 dan merupakan salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam pemerintahan daerah di Jawa Tengah. Pendidikan formal menjadi bagian penting dalam pembentukan kapasitasnya. Etik Suryani menyelesaikan pendidikan menengahnya di Surakarta

dan Kartasura sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Surakarta (UNSA) di mana ia meraih gelar sarjana ekonomi. Selanjutnya ia menyelesaikan program Magister Manajemen di STIE AUB Surakarta, yang memberikan landasan teoritis dan kemampuan manajerial untuk berperan dalam birokrasi pemerintahan.

Sebelum terlibat dalam politik formal, Etik Suryani memiliki pengalaman profesional yang panjang di sektor perbankan. Ia bekerja di Bank Bumi Arta Tbk. Surakarta hingga tahun 2010, termasuk di posisi yang melibatkan tugas kepemimpinan dan pengelolaan operasional kantor. Pengalaman di sektor perbankan ini memberikan Etik Suryani pemahaman tentang struktur organisasi, hubungan kerja, serta keterampilan komunikasi yang menjadi modal penting dalam aktivitas sosial dan pemerintahan di kemudian hari.

Selain karir profesional, Etik Suryani aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia dikenal aktif di kalangan masyarakat Sukoharjo melalui keterlibatannya dalam Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Sukoharjo sebagai ketua. Dalam perannya ia mengkoordinasikan program pemberdayaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan kader PKK di desa dan kelurahan. Kegiatan-kegiatan ini memperluas jejaring sosialnya dan memperkuat relasi dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Status Etik Suryani sebagai istri dari Wardoyo Wijaya, yang sempat menjabat sebagai Bupati Sukoharjo selama dua periode, turut memperluas ruang interaksinya dalam dinamika sosial-politik lokal. Sebagai pasangan kepala daerah, Etik Suryani sering terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat, baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun program pemerintahan yang melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Keterlibatan ini menjadi bagian dari proses pembentukan jaringan sosial yang penting dalam struktur politik lokal.

Aktivitas sosial Etik Suryani tidak hanya dominan di ranah organisasi formal. Ia juga tampak hadir dalam berbagai kegiatan yang melibatkan kerja bersama warga dan institusi lainnya, seperti kegiatan karya bhakti bersama TNI di desa-desa. Kegiatan ini menunjukkan upaya pemerintah, melalui figur tokoh publik, untuk memperkuat hubungan sosial dengan warga dan menegaskan kesamaan tanggung jawab politik.

Perjalanan Etik Suryani dalam politik formal bermula ketika ia maju sebagai calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020. Dukungan partai politik menjadi faktor penting dalam pencalonannya. Etik Suryani diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama partai lain yang tergabung dalam koalisi lokal. Dukungan ini menjadi legitimasi organisasi elite terhadap kandidat dalam struktur kontestasi politik lokal.

Dalam pilkada 2024, Etik Suryani kembali mencalonkan diri bersama Eko Sapto Purnomo sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati dan ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai pasangan calon dengan dukungan gabungan 12 partai politik. Konsolidasi dukungan dari banyak partai memperlihatkan bahwa basis politik Etik Suryani telah melewati tahan awal dan diperkuat oleh struktur kepartaian di tingkat lokal.

Etik Suryani kemudian memenangkan Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2024 dan secara resmi dilantik sebagai Bupati Sukoharjo periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini menunjukkan keberlanjutan kepemimpinannya setelah periode sebelumnya dan menegaskan legitimasi politik yang diperolehnya melalui proses elektoral.

Sebagai kepala daerah, Etik Suryani telah menempatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo, ia menyampaikan beberapa misi strategis pembangunan daerah, mulai dari digitalisasi layanan publik sampai pengembangan sumber daya manusia, yang mencerminkan arah kebijakan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinannya.

Dengan demikian perjalanan hidup dan karier Etik Suryani menunjukkan sebuah proses yang saling berkaitan, dari pendidikan formal dan pengalaman profesional, keterlibatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, posisi sebagai istri kepala daerah hingga masuk dan berperan dalam politik formal. Rangkaian aktivitas tersebut menjadi bagian dari pembentukan basis sosial dan politiknya di masyarakat Sukoharjo.

2.2.2 Hubungan Keluarga Etik Suryani dengan Wardoyo Wijaya dan Aktivitas Politik Wardoyo Wijaya

Etik Suryani memiliki hubungan keluarga dengan Bupati sebelumnya, ia merupakan istri dari Wardoyo Wijaya. Wardoyo menjabat selama dua periode yaitu di tahun 2010-2015 dan 2016-2021. Selama Wardoyo menjabat

pembangunan fisik di Sukoharjo berkembang pesat. Hotel, apartemen, rumah sakit banyak dibangun guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, lebih dari separuh pasar tradisional yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo telah direvitalisasi. Juga beberapa proyek besar berjumlah miliaran rupiah dilakukan. Seperti pembangunan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Sukoharjo, kemudian revitalisasi Pasar Ir. Soekarno, juga pembangunan city walk di pinggir Jl. Jenderal Sudirman. Terakhir juga terdapat pembangunan Menara Wijaya yang membutuhkan Rp 94 miliar .

Selain pembangunan infrastruktur yang amat terlihat, pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo terus meningkat pada masa Wardoyo. Pemerintah mendorong penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah. Tetapi pemerintahan Wardoyo juga meninggalkan rapor merah, misalnya lemahnya manajemen pengendalian organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kekosongan jabatan di beberapa OPD Pemkab Sukoharjo (Wicaksono, 2021).

Pemerintahan Wardoyo menjadi latar belakang majunya Etik Suryani sebagai Bupati Sukoharjo. Rekam jejak Wardoyo pada akhirnya mendorong terbentuknya persepsi masyarakat terhadap Etik sebagai penerus kepemimpinan Wardoyo.

2.3 Dinamika Pilkada Sukoharjo

2.3.1 Dinamika Pilkada Sukoharjo 2020 dan Transisi Kepemimpinan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo pada Desember 2020 merupakan bagian dari Pilkada serentak di Indonesia yang berlangsung di

tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam kontestasi tersebut terdapat dua pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik lokal dan nasional. Pasangan Hj. Etik Suryani, S.E., M.M – Drs. Agus Santosa mau sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan dari berbagai partai besar seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan partai lain. Sedangkan pasangan Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa maju sebagai pesaing dalam pemilihan tersebut (KPU KAB. SUKOHARJO, 2021).

Hasil rekapitulasi suara yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa pasangan Etik Suryani- Agus Santosa memperoleh suara sebesar 53,34 persen mengungguli pasangan Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa yang meraih 46,66 persen suara sah. Jumlah suara sah mencapai sekitar 499.608 suara, dan keputusan kemenangan ditetapkan melalui rapat pleno terbuka oleh KPU setempat (Ivan, 2020).

Kondisi politik lokal Sukoharjo pada masa Pilkada 2020 juga dipengaruhi oleh dinamika internal partai politik, pola koalisi, serta peran politik figur lokal. Salah satu faktor penting konteks penting adalah keterlibatan Wardoyo Wijaya, yang menjabat sebagai Bupati Sukoharjo selama beberapa periode sebelum pilkada 2020, dan juga merupakan kader PDIP serta ketua DPC PDIP Sukoharjo. PDIP secara resmi mengusung Etik Suryani sebagai calon bupati, yang dikabarkan melalui rekomendasi parpol menjadi konsolidasi dukungan partai terhadap pasangan calon tersebut. Dalam pernyataannya menjelang pemilihan, Wardoyo memandang isu politik dinasti yang muncul sebagian dari wacana

kampanye lawan politik dan menegaskan bahwa legitimasi kemenangan tetap berada pada pilihan rakyat melalui mekanisme pemungutan suara (Isnanto, 2020).

Keterlibatan Wardoyo dalam berbagai kegiatan politik dan sosial semenjak menjabat sebagai Bupati Sukoharjo pada periode sebelumnya, menunjukkan peran kepemimpinannya. Wardoyo dikenal aktif dalam berbagai pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti penguatan birokrasi melalui pelantikan pejabat struktural, respon terhadap dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19, serta program di sektor pertanian dan pelayanan publik. Aktivitas tersebut membentuk persepsi publik mengenai keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas politik di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu Wardoyo juga melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan dukungan terhadap kegiatan masyarakat di masa kampanye (PPID KAB. SUKOHARJO, 2020). Wardoyo mencerminkan perannya sebagai figur politik lokal yang aktif dalam memperkenalkan calon yang diusung oleh partai kepada publik. Upaya ini menjadi bagian dari konteks pembangunan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon Etik Suryani-Agus Santosa sebagai kelanjutan kepemimpinan di Sukoharjo. Dengan demikian, Pilkada Sukoharjo 2020 tidak hanya berlangsung sebagai prosedur demokrasi elektoral, tetapi juga menggambarkan dinamika politik lokal yang melibatkan transisi kepemimpinan dari Bupati periode sebelumnya, Wardoyo Wijaya, kepada Etik Suryani sebagai figur yang dipilih masyarakat melalui proses pemungutan suara.

2.3.2 Dinamika Politik Pilkada Sukoharjo 2024

Pada Pilkada Sukoharjo 2024, Etik Suryani yang mana seorang petahana mengajukan diri lagi sebagai Calon Bupati Sukoharjo bersama Eko Sapto Purnomo. Etik maju dengan dukungan penuh tujuh partai, terutama PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki basis kuat di kalangan masyarakat Sukoharjo. Selain dukungan partai, hubungan keluarga dengan Wardoyo, suami selaku mantan Bupati Sukoharjo sebelumnya, cukup memberi legitimasi tambahan bagi Etik Suryani.

Pilkada Sukoharjo juga menarik karena tidak hadirnya lawan politik. Etik Suryani menjadi calon tunggal bersama Eko melawan kotak kosong. Berbagai respons muncul di masyarakat, sebagian melihat ini dikarenakan dominasi PDI di Sukoharjo, sebagian yang lain melihat sebagai akibat kurang sehatnya demokrasi lokal. Dari respon masyarakat pun Etik juga relatif diuntungkan. Mayoritas masyarakat memberi dukungan karena melihat Wardoyo dan juga kinerja Etik selama periode sebelumnya. Namun ada juga yg melihat kemenangan calon tunggal hanyalah formalitas elektoral. Dengan demikian, dinamika Pilkada Sukoharjo 2024 memperlihatkan dinamika pilkada yang mengkombinasikan antara politik keluarga, dominasi partai, juga persepsi publik terhadap praktik demokrasi lokal di Sukoharjo.

2.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sukoharjo

Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu kondisi sosial berbasis data statistik serta kehidupan

sosial budaya berbasis nilai, tradisi dan praktik sosial masyarakat. Kedua dimensi ini menjadi konteks tempat interaksi sosial, kehidupan komunitas, dan dinamika politik lokal berlangsung.

2.4.1 Kondisi Sosial berdasarkan Data Statistik

Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo tergolong sangat tinggi, terlihat dari angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun sebesar 99,37%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia produktif telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia.

Partisipasi pendidikan dasar juga relatif tinggi, namun menunjukkan penurunan pada jenjang yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024 tercatat 98,85% pada tingkat SD, menurun menjadi 79,94% pada SMP, dan 74,10% pada SMA/SMK/MA. Pola ini menggambarkan bahwa pendidikan dasar telah menjangkau sebagian besar masyarakat, sementara tidak seluruh penduduk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas.

Dari sisi sosial ekonomi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 tercatat 68,15 ribu jiwa atau sekitar 7,47% dari total penduduk, dengan garis kemiskinan sebesar Rp501.693 per kapita per bulan. Data ini menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang masih rentan secara ekonomi, yang menjadi bagian dari struktur sosial daerah (*Kabupaten Sukoharjo dalam Angka*, 2025).

2.4.2 Nilai Sosial dan Tradisi Lokal

Kehidupan sosial masyarakat Sukoharjo ditandai oleh masih kuatnya nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Pemerintah daerah melalui kebijakan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya menekankan pentingnya gotong royong, kebersamaan, solidaritas sosial, serta pelestarian tradisi lokal sebagai bagian dari modal sosial masyarakat. Tradisi, kesenian, dan praktik budaya tersebut membentuk kehidupan sosial yang menjunjung keharmonisan serta kepatuhan terhadap norma sosial yang berlaku (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, 2020).

Secara kultural, Sukoharjo berkembang dalam basis tradisi Jawa yang tercermin dari kesenian lokal seperti wayang kulit, karawitan, reog, ketoprak, serta kegiatan budaya desa seperti bersih desa dan hajatan masyarakat. Identitas daerah sebagai kawasan pertanian, industri batik, tekstil dan jamu tradisional turut membentuk relasi sosial yang akrab dan berbasis kebersamaan dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Dokumentasi sistem informasi desa menunjukkan adanya pendataan dan pembinaan seni budaya, yang menggambarkan bahwa aktivitas seni dan tradisi masih menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat (PIDEKSO, 2023).

2.4.3 Struktur Sosial Komunitas dan Pola Relasi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Sukoharjo banyak berlangsung dalam lingkup komunitas lokal seperti desa, lingkungan keagamaan, serta kelompok

sosial berbasis budaya. Pola interaksi sosial cenderung bersifat akrab, dengan hubungan sosial yang terbangun melalui kegiatan bersama seperti acara budaya, kegiatan keagamaan, dan aktivitas ekonomi komunitas. Dalam konteks ini, relasi sosial tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan berbasis jaringan sosial yang terpelihara dalam kehidupan sehari-hari.

2.4.4 Nilai Sosial Budaya dalam Konteks Perilaku Pemilih

Kondisi sosial budaya masyarakat juga berinteraksi dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya sungkan, rasa tidak enak menolak pemberian, serta pandangan tentang rezeki dan pemberian dari pihak lain (Martini dkk., 2021). Dokumen resmi yang merujuk kajian lembaga antikorupsi menjelaskan bahwa dalam sejumlah masyarakat, norma sosial seperti anggapan tidak baik menolak pemberian dan pandangan bahwa “rezeki tidak boleh ditolak” dapat menjadi salah satu konteks sosial yang berkaitan dengan penerimaan praktik politik uang. Dalam kajian tersebut, faktor budaya dipahami sebagai bagian dari lingkungan sosial yang mempengaruhi cara individu merespons pemberian dalam konteks politik (B. A. Putri, 2024).

Penelitian mengenai keterwakilan perempuan dan fenomena money politics di Sukoharjo juga menunjukkan bahwa kebiasaan menerima pemberian, dikombinasikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi ekonomi tertentu, menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi pilihan politik warga. Uraian ini tidak dimaksudkan menggeneralisasi perilaku seluruh masyarakat,

melainkan sebagai konteks sosial budaya yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian (Nurhayati dkk., 2021).

2.4.5 Dinamika Sosial Generasi dan Kelompok Pemilih

Kondisi sosial budaya masyarakat Sukoharjo juga menunjukkan dinamika antar kelompok generasi. Penelitian mengenai pemilih milenial di salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo menemukan bahwa kelompok muda cenderung menunjukkan karakter pemilih yang lebih rasional dan kritis, didukung oleh akses pendidikan dan teknologi informasi, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada hubungan kekerabatan atau pemberian materi dalam menentukan pilihan politik (Hamsah, t.t.).

Sementara itu, studi mengenai partisipasi politik perempuan di Sukoharjo menunjukkan bahwa pengetahuan politik, dukungan keluarga, serta rangsangan politik seperti kampanye dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan perempuan dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial keluarga dan komunitas memiliki peran dalam membentuk perilaku politik masyarakat (Nurhayati dkk., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi sosial budaya masyarakat Sukoharjo menunjukkan karakter masyarakat yang masih kuat dengan nilai kolektivisme, harmoni sosial, serta hubungan berbasis kedekatan sosial. Dalam konteks politik, kondisi ini membentuk budaya politik masyarakat yang tidak sepenuhnya individualistik, tetapi masih dipengaruhi oleh relasi sosial, norma timbal balik, serta pertimbangan sosial dalam menentukan pilihan politik. Di sisi lain,

meningkatnya akses pendidikan dan informasi, khususnya pada generasi muda, menunjukkan adanya dinamika menuju pola budaya politik yang lebih rasional. Dengan demikian, budaya politik masyarakat Sukoharjo berada dalam persilangan antara nilai tradisional dan proses modernisasi sosial.